

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
(SUATU STUDI TENTANG PEMBIAYAAN SD NEGERI NO. 18  
TANJUNG KANDIS DAN SD NEGERI NO. 22 PASAR TALUK)  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TESIS**



**Oleh**

**DAFRI  
NIM51348**

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam  
mendapatkan gelar Magister Pendidikan**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
(SUATU STUDI TENTANG PEMBIAYAAN SD NEGERI NO. 18  
TANJUNG KANDIS DAN SD NEGERI NO. 22 PASAR TALUK)  
KECAMATAN BATANG KAPAS  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TESIS**



**Oleh**

**DAFRI  
NIM51348**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**DR. YAHYA, M.Pd**

**NURHIZRAH GISTITUATI, M.Ed.,Ed.D**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya ini dengan judul : **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan” (Suatu Studi Tentang Pembiayaan SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Agustus 2011  
Saya Yang Menyatakan

Dafri  
NIM. 51348

## ABSTRACT

**DAFRI. 2011.** *Education Finance Management (A Study of Elementary School Financing No 18 Tanjung Kandis and Elementary School No. 22 Market Taluk) Subdistrict of Batang Kapas, District of Pesisir Selatan.* Thesis Graduated Program (S2). State University of Padang

In order to achieve optimal educational purposes, there is one thing needs to be done is to manage the costs well within budget funds available to the educational unit. Management education funding include the planning, implementation and supervision of education financing. However, funds available for school operations nonpersonalia in primary schools for the Districk of Pesisir Selatan dominated by the central fund, through the BOS funds.

This research was conducted using qualitative research methods with descriptive approach. Data and information collected through direct observation by the researcher, interviews with informants, and documentation study. Research informants determined by using the snowball technique. This study set the principal of SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis as the first key informant, and the principal of SD Negeri No. 22 Pasar Taluk as the second key informant. Through information from key informants, the researcher then directed to the next informant, the Treasurer of School, teachers, school board committees, the employee of Office of Technical Implementation Unit Districk of Batang Kapas and communities around the same school.

After doing the research, revealed the following things: 1) Planning finance education in schools is still not functioning in accordance with established standards or rules, but rather the policies undertaken by their respective principals; 2) Implementation and supervision of education financing in each school is different in accordance with the policy of the principal, even though it is welknown that the implementation and supervision of education financing was done by all competent parties who have governed in a variety of rules and legislation; 3) The role of the BOS funds cover 100% in financing the implementation of non-personnel operating education in schools. These funds are able to encourage schools carry out operational activities of non personnel, although not optimally cover the entire financing activities as has been budgeted in each school. The findings of this research is verified through triangulation technique by examining the validity of data that uses something other than the data for checking purposes or for purposes of comparison data

## ABSTRAK

**DAFRI. 2011.** *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Suatu Studi Pembiayaan SD Negeri No 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No 22 Pasar Taluk) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.* Tesis Program Pascasarjana (S2). Universitas Negeri Padang

Agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satu yang perlu dilakukan adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan dana yang tersedia pada satuan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan tersebut meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Namun, dana yang tersedia untuk kegiatan operasional sekolah nonpersonalia di sekolah dasar untuk daerah Pesisir Selatan hanya didominasi oleh dana pusat, melalui dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan manajemen pembiayaan pendidikan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menetapkan Kepala Sekolah SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis sebagai informan kunci pertama, dan Kepala Sekolah SD Negeri No. 22 Pasar Taluk sebagai informan kunci kedua. Melalui informasi dari informan kunci ini, peneliti kemudian di arahkan ke informan berikutnya, yaitu bendahara sekolah, para guru, dewan komite sekolah, Pejabat UPTD Kecamatan Batang Kapas dan masyarakat selingkungan SD tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, terungkap: 1) Perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah masih belum berjalan sesuai dengan standar atau aturan yang ditetapkan, namun dilaksanakan lebih kepada kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah masing-masing ; 2) Pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan pada masing-masing sekolah berbeda sesuai dengan kebijakan kepala sekolah, meskipun pada prinsipnya telah jelas bahwa pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan tadi dilakukan oleh segenap pihak berkompeten yang telah diatur dalam berbagai aturan dan perundang-undangan ; 3) Peran dana BOS mencakup 100% dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan operasional non personalia di sekolah. Dana ini mampu mendorong sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional non personalia, meskipun belum maksimal menutupi keseluruhan pembiayaan kegiatan sebagaimana yang telah dianggarkan masing-masing sekolah. Temuan penelitian ini diverifikasi melalui teknik triangulasi yaitu melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## KATA PENGANTAR

Dengan memohon perlindungan Allah SWT. Tuhan Seru Sekalian Alam aku berlindung dari pengaruh syaitan yang terkutuk yang membawa bencana kebodohan. Bermula dengan ucapan Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayah dan hinayah-Nya. Shalawat dan salam agar disampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam.

Atas berkat dan rahmat Allah SWT, akhirnya penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*” (*Suatu Studi Tentang Pembiayaan SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk*) *Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.*

Penelitian dan penulisan tesis ini terlaksana atas bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Dr. Yahya, M.Pd dan Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D selaku pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kesediaan dalam meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Rusdinal, M.Pd, Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd dan Prof. Dr. H. Mukhaiyar selaku kontributor yang telah memberikan sumbangan saran, kritik dan ide demi sempurnanya penelitian dan penulisan tesis ini.

3. Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama penyelesaian penelitian ini.
4. Para dosen Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan, serta segenap karyawan Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. Kepala kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Kapas atas izin dan keikutsertaannya dalam penelitian ini.
7. Kepala sekolah SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis, kepala sekolah SD Negeri No. 22 Pasar Taluk beserta guru-guru dan karyawan yang telah banyak membantu penulis melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis do'akan semoga Allah SWT, membalas semua bentuk bantuan di atas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Manajemen .....	12
B. Pembiayaan Pendidikan.....	15
1. Pembiayaan dalam Pengembangan Pendidikan.....	15
2. Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan dan Macam-macam Jenis Biaya.....	18
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	21
1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan.....	25
2. Pelaksanaan dan pengawasan Pembiayaan Pendidikan.....	27
D. Konsep dan Standar Pembiayaan Pendidikan .....	29
E. Efektifitas Pembiayaan Pendidikan.....	31
F. Penelitian yang Relevan .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metodologi Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Informan Penelitian .....	38
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	39
1. Wawancara.....	39

2. Observasi.....	41
3. AnalisisDokumen.....	42
4. Metode <i>Library Reasearch</i> atau Studi Kepustakaan.....	42
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data.....	45
2. Penyajian data.....	46
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi.....	47
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	48
1. KeadaanSekolah di KabupatenPesisir Selatan.....	48
2. KeadaanSekolahDasar di KecamatanBatangkapas.....	51
3. KondisiKeuanganSekolahDasarNegeri di KecamatanBatang Kapas.....	52
B. Temuan Khusus .....	57
1. PerencanaanPembiayaanPendidikan.....	64
2. PelaksanaandanPengawasanPembiayaanPendidikan .....	68
3. EfektifitasPembiayaan Pendidikan.....	76
C. Pembahasan.....	78
1. PerencanaanPembiayaanPendidikan.....	78
2. PelaksanaandanPengawasanPembiayaanPendidikan .....	88
3. EfektifitasPembiayaan Pendidikan.....	97
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Implikasi .....	104
C. Saran .....	105
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	107
<b>LAMPIRAN</b> .....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian SD Inti dan SD Imbas di Gugus VI Kecamatan Batang Kapas.....	37
Tabel 2	Data Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.....	49
Tabel 3	Rincian jumlah dana BOS per sekolah di Kecamatan Batang Kapas.....	52
Tabel 4	RAPBS SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis.....	53
Tabel 5	RAPBS SD Negeri No. 22 Pasar Taluk.....	54
Tabel 6	Laporan Penggunaan Dana BOS SD Negeri No. 22 Pasar Taluk.....	55
Tabel 7	Alur Wawancara Di SDN No. 18 Tanjung Kandis.....	59
Tabel 8	Alur Wawancara Di SDN No 22 Pasar Taluk.....	61
Tabel 9.	Standar Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Permendiknas No. 69 Tahun 2009.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Lokasi Penelitian.....	37
Gambar 2	Denah Lokasi Penelitian.....	38
Gambar 3	Langkah-langkah metoda penelitian kualitatif.....	45
Gambar 4	Bagan Alur Wawancara di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis.....	58
Gambar 5	Bagan Alur Wawancara di SD Negeri No. 22 Pasar Taluk .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b>	Interview GuideDan Sajian Data Lapangan.....	110
<b>LAMPIRAN 2</b>	Lembar Observasi.....	134
<b>LAMPIRAN 3</b>	Tabel Pengambilan data Penelitian.....	135
<b>LAMPIRAN 4</b>	Foto Lingkungan Sekolah Tempat Penelitian.....	136
<b>LAMPIRAN 5</b>	FotoKegiatanWawancara.....	138
<b>LAMPIRAN 6</b>	Surat Persetujuan Penelitian.....	146
<b>LAMPIRAN 7</b>	Surat Izin Penelitian.....	147
<b>LAMPIRAN 8</b>	Dokumen RAPBS SD Negeri No. 18 Tanjung Kandisdan SD Negeri No. 22 PasarTaluk.....	150

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh kembangkan potensi dirinya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 3, yang berisi tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.

Dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tersebut dijelaskan tentang pendanaan pendidikan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pada pasal 12 ayat 1 menjelaskan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kemudian disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan berkualitas membutuhkan dana yang memadai. Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, dan angka prestasi belajar siswa. Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman terhadap berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangat penting bagi suatu sekolah. Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga bersifat makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasil yang diukur dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat

sekolah Dedi Supriadi, (2003:7). Kesemuanya tergabung dalam suatu kesatuan manajemen yakni manajemen pembiayaan pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 mengenai Pembiayaan pendidikan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun dan Pengentasan Buta Aksara dijelaskan bahwa :

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Pendidikan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi;
  - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota;
  - d. Sumber lain yang tidak mengikat.
2. Sumber pendanaan tersebut diupayakan dengan proporsi sebagai berikut:
  - a. APBN Pusat; antara 50% - 60%
  - b. APBD Provinsi; antara 20% - 30%
  - c. APBD Kabupaten/Kota; antara 20% - 30%.
3. Prosedur tentang pengajuan dana, pencairan dana, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana, mengacu pada peraturan yang berlaku.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen, yang memiliki rentang dan bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme

pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus mengenai pembiayaan pendidikan dasar diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1 bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Sebagaimana juga dinyatakan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 pasal 3 menegaskan bahwa, biaya pendidikan meliputi: a. Biaya satuan

pendidikan, b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, c. Biaya pribadi peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 maka, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana/biaya guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah pada bulan Januari 2001, memberi respon yang berbeda-beda dari masing-masing daerah. Menurut Yahya, (2009:180) respon ini terutama dari tiga aspek; pertama, ketidakpastian daerah secara teknis untuk mengelola pendidikan karena kurangnya pengalaman dan sumberdaya yang tersedia; kedua, tidak tersedianya anggaran dalam mengoperasikan satuan pendidikan untuk berbagai jenis dan jenjang sesuai tuntutan standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat; ketiga, adanya *multi power* yang menangani pendidikan sehingga ada daerah yang terkesan apatis.

Besaran anggaran pembiayaan pendidikan sangat membantu bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan proses pendidikan di sekolah. Diduga kebutuhan akan pembiayaan pendidikan sekarang jauh lebih besar dari pembiayaan yang telah ada, dalam arti kata, pembiayaan pendidikan yang ada saat ini masih kurang memadai.

Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan integratis antara stakeholder agar terwujud kondisi ini perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat

itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk mewujudkan efektivitas pembiayaan pendidikan. Untuk itulah, pemerintah membentuk badan komite sekolah sebagai mitra bagi sekolah dalam mengelola, merencanakan, dan mengawasi dana yang mengalir ke sekolah.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 menjelaskan bahwa, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dari uraian sebelumnya membuktikan bahwa, komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam penyelenggaraan program-program sekolah termasuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya produksi. J. Hallack (2004:63) mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi biaya produksi, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayan umum.

Permasalahan umum yang masih dirasakan dalam dunia pendidikan adalah tentang pembiayaan. Masalah pembiayaan meliputi sumber biaya, manajemen pembiayaan, pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban tentang pembiayaan pendidikan di sekolah. Hal ini juga mengindikasikan pentingnya masalah pembiayaan pendidikan bagi suatu sekolah, karena serangkaian kegiatan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada pendanaannya.

Permasalahan pendidikan nasional tak pernah usai, salah satu permasalahan itu adalah yang berkenaan dengan pembiayaan pendidikan. Sebenarnya, untuk mencapai pendidikan bermutu membutuhkan biaya yang memadai. Namun, persoalannya daya finansial sebagian masyarakat masih belum memadai akibat sumber pendapatan yang tak pasti. Persoalan yang paling krusial adalah perhitungan biaya pendidikan yang sesungguhnya, yaitu tentang besaran

dan efektivitas biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar.

Agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satu yang perlu dilakukan adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan anggaran dana yang tersedia pada satuan pendidikan seefektif mungkin. Fenomena di lapangan, kendali pembiayaan pendidikan nonpersonalia di sekolah dasar untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan hanya didominasi oleh dana pusat, melalui dana BOS. Namun penggunaan anggaran biaya pendidikan tersebut diduga kurang efektif dan efisien.

Sebagaimana ditegaskan oleh Syaiful Sagala (2000:141-142) bahwa, sekolah secara mandiri dan berkewenangan penuh menata anggaran biaya dan dana secara efisien, karena penambahan jumlah *enrollment* akan menguras sumber daya dan dana yang cukup besar. Penggunaan biaya yang tidak perlu hendaknya dihindari, oleh karena itu biaya diarahkan untuk mendukung proses belajar mengajar sebagai kegiatan pokok sekolah. Artinya, dana operasional non personalia yang ada di sekolah akan lebih baik jika diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan perbaikan dan pengayaan, pengembangan bakat, pembinaan karakter siswa dalam rangka meningkatkan prestasi sekolah, dan meningkatkan mutu hasil belajar. Semua pelaksanaan pembiayaan pendidikan di atas, akan terlaksana dengan baik jika melewati serangkaian manajemen yang baik pula.

Manajemen pembiayaan pendidikan tersebut harus dikaji dengan baik agar tujuan manajemen tersebut dapat tercapai. Apalagi jika menyangkut dengan pembiayaan, karena pembiayaan di sekolah merupakan hal vital yang sangat

menunjang terjadinya proses pendidikan di sekolah. Manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan yang buruk akan berdampak pada buruknya kinerja yang dihasilkan melalui penggunaan dana yang tersedia. Sehingga dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah menjadi tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas teramati selama bulan Desember 2010-Januari 2011 ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti, yaitu:

1. Tentang konsep manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar.
2. Melihat efektivitas pembiayaan pendidikan untuk mencukupi kebutuhan dana operasional sekolah

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” Suatu Studi Tentang Pembiayaan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Secara umum pendidikan dasar mengalami masalah yang krusial berkaitan dengan pembiayaan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Pengelolaann pendidikan pada satuan pendidikan di sekolah dasar akan lebih maksimal bila disertai manajemen keuangan yang baik, karena pengelolaan keuangan sekolah yang bijaksana akan melahirkan kegiatan yang benar-benar perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi suatu sekolah. Untuk itu,

diperlukan suatu manajemen yang baik dalam mengatur dan mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah dasar.

Banyak hal yang bisa dikaji mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah dasar. Namun keterbatasan peneliti dari segi biaya dan waktu, maka yang dijadikan fokus penelitian adalah terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dan melihat sejauh mana efektivitas pembiayaan pendidikan di sekolah mampu menutupi setiap kebutuhan di sekolah dasar.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis menetapkan pertanyaan penelitian yang perlu dicarikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas?
3. Bagaimana efektivitas pembiayaan pendidikan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Senada dengan permasalahan yang dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan manajemen pembiayaan pendidikan di SD Negeri No. 18 Tanjung Kandis dan SD Negeri No. 22 Pasar Taluk Kecamatan Batang Kapas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kepala Sekolah di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan kepala sekolah dalam membuat dan menentukan kebijakan berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di sekolah masing-masing, sehingga dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.
2. Dinas pendidikan dan pihak yang berwenang mengelola dan membina sekolah dasar sebagai landasan berfikir dalam mengambil keputusan.
3. Masyarakat, terutama komite sekolah sebagai mitra kerja sekolah dalam melaksanakan fungsinya masing-masing sebagai bentuk kontribusi terhadap dunia pendidikan. Misalnya melakukan monitoring secara berkala ke sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Peneliti sendiri dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di lingkungan sekolah dasar.
5. Peneliti berikutnya sebagai masukan.